

BAB III.

Upaya Arab Saudi Terhadap Organisasi Kerja sama Islam Dalam Menyelesaikan Konflik Iran dan Arab Saudi Tahun 2013-2018

3.1 Upaya Arab Saudi dalam Organisasi Kerja sama Islam

Dalam politik internasional, negara memiliki kedudukan dan posisi penting dalam menentukan keberlangsungan hidupnya. Artinya negara sebagai suatu entitas politik diberikan kedaulatan dan kekayaan sumber daya yang dimiliki dalam usahanya untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan oleh negara itu. Kemudian hal lainnya yang penting untuk diketahui bahwa negara juga dapat memanfaatkan posisi geografinya sebagai sarana dalam mencapai kepentingan politiknya.

Di satu sisi, suatu negara akan senantiasa membangun hubungan luar negeri dengan negara lain untuk memenuhi kebutuhannya. Di sisi lain, adanya kewenangan tertentu yang dimiliki oleh suatu negara terutama dalam kapasitasnya sebagai anggota organisasi internasional tentunya dapat dimanfaatkan sebagai instrumen dalam membangun kekuatan untuk menyebarluaskan pengaruhnya terhadap organisasi tersebut.

Maka dari itu, suatu negara mencoba untuk memberikan upayanya melalui keberadaan dari organisasi internasional. Oleh karena itu, berbicara mengenai upaya Arab Saudi terhadap internal kelembagaan Organisasi Kerja sama Islam diantaranya sebagai negara pendonor terbesar yang diikuti dengan dominasinya terhadap hubungan bilateral dengan mayoritas negara anggota OKI dan kapasitasnya dalam susunan struktur organisasi (Ahmed, 2017, pp. 1-3).

3.1.1 Arab Saudi sebagai negara pendonor terbesar

Berbicara mengenai upaya Arab Saudi dalam bentuk bantuan dana dapat dilihat terutama terhadap negara anggota Organisasi Kerja sama Islam. Adapun bantuan dana tersebut dapat dibuktikan bahwa pemerintah Arab Saudi sejak tahun 1970 telah menyiapkan investasi sebesar US\$ 100 miliar yang digunakan untuk pembangunan masjid, madrasah dan lembaga budaya di berbagai negara hingga saat ini termasuk negara anggota OKI (Dorsey, 2016). Adanya bantuan dana yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi dapat dipahami sebagai usaha untuk menunjukkan bahwa negara tersebut menginginkan negara lainnya mengikuti apa yang mereka kehendaki. Namun dalam perkembangannya bahwa Arab Saudi mencoba untuk menyebarluaskan pengaruhnya dalam bentuk ideologis atau yang dikenal dengan gagasan Wahabisme.

Maka dari itu, dengan pendekatan *soft power* dalam hal ini melalui bantuan keuangan tentunya dapat memudahkan Arab Saudi dalam menciptakan aliansi baru untuk mencapai kepentingannya khususnya di regional Timur Tengah. Kemudian identitas Arab Saudi sebagai negara yang kaya akan minyak bumi tentunya mampu menarik negara lain dalam menciptakan suatu kerja sama internasional. Selain itu, pemerintah Arab Saudi senantiasa melihat peluang tersebut sebagai upaya untuk menciptakan suatu ketergantungan terhadap negara anggota OKI, sehingga pada akhirnya Arab Saudi semakin mudah untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan.

Selanjutnya, upaya Arab Saudi lainnya yang berkaitan dengan bantuan dana terutama terhadap negara anggota OKI yaitu adanya pemberian beasiswa terhadap pelajar yang ingin melanjutkan studinya di perguruan tinggi Islam di Arab Saudi. Adapun upaya tersebut dapat dibuktikan bahwa pemerintah Arab Saudi telah menyiapkan beasiswa untuk 2.053 pelajar dari 130 negara dan sebagian besar beasiswa tersebut didapatkan oleh Indonesia dan Pakistan (Toumi, 2012). Untuk itu program beasiswa yang telah diberikan oleh pemerintah Arab Saudi dapat dilihat sebagai usaha yang sistematis dan terorganisir dalam menyebarluaskan nilai atau ideologinya khususnya di dunia Islam itu sendiri khususnya terhadap negara anggota OKI.

Selanjutnya dorongan yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi melalui pendanaan dalam bentuk beasiswa dapat menciptakan suatu hasil yang cukup baik. Adapun hasil yang mampu dicapai yaitu keberhasilannya dalam mendapatkan suatu kepemimpinan dalam beberapa institusi, misalnya Ahmed Yousef Ahmed Al Draiwheeh yang merupakan warga Arab Saudi dan menjadi Presiden Universitas Islam Internasional di Pakistan (Syed, 2016, p. 60). Hal tersebut telah membuktikan bahwa pendanaan yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi terhadap berbagai institusi di dunia mampu menciptakan hasil yang baik.

Maka dari itu, salah satu pencapaian yang diperoleh Arab Saudi dengan memberikan bantuan dana terhadap institusi pendidikan akan senantiasa menciptakan citra positif terhadap negara lainnya. Selain itu hingga saat ini pendanaan merupakan sarana penting untuk memperluas dominasi atau pengaruhnya, sehingga negara-

negara yang lemah secara ekonomi senantiasa rentan dengan pengaruh Arab Saudi. Kemudian strategi di atas dapat dipahami sebagai upaya untuk mempromosikan kepentingan luar negeri Arab Saudi. Untuk itu, adanya distribusi bantuan luar negeri biasanya juga didorong oleh kepentingan dalam bidang politik dan keamanan jangka pendek dari negara pendonor (Gravingholt, 2016, pp. 1-2).

Adapun pemberian bantuan dana oleh Arab Saudi juga telah didukung dengan adanya Kantor Sekretariat OKI yang berada di Arab Saudi dan *Islamic Development Bank* / Bank Pembangunan Islam yang berpusat di Jeddah. Adanya Bank Pembangunan Islam didirikan dalam rangka mendorong dan memperkuat kerja sama ekonomi terhadap negara anggota OKI serta pada tahun 2008 telah memiliki modal sebesar US\$ 2 Miliar untuk menjalankan programnya (Zuhur, 2011, p. 169). Lebih lanjut adanya sarana pendukung di atas tentunya Arab Saudi memiliki posisi penting terhadap kontrol dari lembaga tersebut. Selain itu, Arab Saudi juga telah mengalokasikan bantuan keuangan sebesar US\$ 1 Miliar ke Bank Pembangunan Islam untuk menunjang program pengentasan kemiskinan (Johnson T. , 2010).

Di satu sisi, ketergantungan yang cukup besar terhadap pendanaan Arab Saudi yang diberikan kepada negara anggota Organisasi Kerja sama Islam dipahami sebagai peluang potensial untuk membantu dalam mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi oleh Arab Saudi.. Di sisi lain bahwa Arab Saudi senantiasa secara terus menerus meningkatkan bantuan keuangan terhadap negara sekutu Arab Saudi yang juga merupakan negara anggota OKI. Hal ini dibuktikan bahwa Arab Saudi telah

mendistribusikan bantuan keuangan hingga mencapai US\$ 22,7 Miliar yang diterima oleh Yaman, Mesir, Palestina, Yordania, Oman dan Bahrain. (Arab News, 2015).

Selain itu, pada tahun 2015 Arab Saudi bersama dengan negara Uni Emirat Arab, Kuwait dan Oman juga telah mendistribusikan bantuan dana sebesar US\$ 12,5 Miliar kepada Mesir (Al-Arabiya News, 2015). Lebih lanjut dalam kurun waktu 1985-2015 diperkirakan bahwa pemerintah Arab Saudi telah menghabiskan dana sebesar US\$ 130 Miliar untuk bantuan luar negerinya (Kechichian, 2016). Alasan Arab Saudi memberikan bantuan dana kepada Mesir karena merupakan negara sekutu Arab Saudi yang juga memiliki kedekatan hubungan dengan Israel (Hannah J. , 2016). Selanjutnya, hubungan Mesir dan Israel tentunya memudahkan Arab Saudi untuk melakukan dialog secara intensif dengan Israel.

Namun, adanya kofrontasi antara Iran dengan Arab Saudi untuk saling memberikan pengaruh di Timur Tengah. Adapun ketegangan yang terjadi antara Iran dengan Arab Saudi yang terjadi hingga saat ini membuat mereka harus saling terlibat dalam *proxy war* di Iraq, Suriah, dan Yaman. Kemudian faktor lainnya yaitu adanya program pengembangan nuklir yang dilakukan oleh Iran membuat Arab Saudi harus segera bertindak sedemikian rupa. Adapun tindakan yang diambil adalah mengintensifkan hubungan bilateral yang pada akhirnya akan memberikan suara penolakan terhadap program nuklir Iran yang dipandang oleh Israel dan Arab Saudi sebagai suatu ancaman keamanan (Spencer, 2015).

Untuk itu, Arab Saudi dan Israel menganggap adanya kebangkitan Iran di Timur Tengah yang diikuti dengan intervensi Iran dalam urusan bilateral negara

lainnya merupakan sesuatu yang sifatnya lebih mendesak dibandingkan dengan isu Palestina (Hannah, 2016). Artinya Israel dan Arab Saudi mencoba untuk menekan Iran dalam menyebarluaskan pengaruhnya dengan tujuan untuk menciptakan aliansi baru. Dengan demikian, bantuan keuangan yang dialokasikan oleh pemerintah Arab Saudi menunjukkan bahwa negara tersebut memiliki *power* untuk mempengaruhi negara lainnya atas apa yang mereka kehendaki.

Kemudian setiap negara yang menerima bantuan Arab Saudi juga mendapatkan suatu keuntungan, baik secara materiil maupun secara non-materiil. Di satu sisi, dengan kekayaan ekonomi yang dimiliki oleh Arab Saudi tentunya dapat meningkatkan *bargaining position* di regional Timur Tengah dan Organisasi Kerja sama Islam. Di sisi lain bahwa dengan adanya kedudukan Arab Saudi yang penting dalam kelembangaan Organisasi Kerja sama Islam senantiasa menjadikan negara tersebut untuk memiliki posisi terdepan dalam keberlangsungan aktivitas yang dirancang dan dijalankan oleh organisasi internasional tersebut.

Maka dari itu strategi di atas dapat membuahkan hasil yang cukup positif yaitu setiap negara yang menerima bantuan Arab Saudi senantiasa dapat menyesuaikan diri dengan kebijakan luar negeri Arab Saudi terutama yang tergabung dalam OKI. Oleh karena itu ketergantungan Organisasi Kerja sama Islam yang cukup besar terhadap pendanaan Arab Saudi menunjukkan bahwa organisasi tersebut rentan terhadap permusuhan dengan Arab Saudi. Hal lainnya yang menarik untuk diketahui bahwasannya selain melalui dana, Arab Saudi juga senantiasa meningkatkan

eksistensinya dalam konteks dominasi terhadap susunan struktur dalam internal kelembagaan Organisasi Kerja sama Islam.

3.1.2 Dominasi terhadap susunan struktur kelembagaan OKI

Selain dominan dalam pendanaan, upaya Arab Saudi lainnya dapat dilihat melalui dominasinya terhadap susunan struktur kelembagaan Organisasi Kerja sama Islam. Hal ini dibuktikan bahwasannya Arab Saudi merupakan tempat dari Sekretariat Akademi Fiqh Islam Internasional yang didirikan tahun 1981 atas dasar kesepakatan dari negara anggota Organisasi Kerja sama Islam (Ihsanoglu, 2010, p. 42). Adapun pendirian Akademi Fiqh Islam Internasional di Makkah dapat memperkuat legitimasi Arab Saudi dalam konteks pengetahuan dan yurisprudensi Islam. Untuk itu, dengan adanya institusi tersebut dapat dipahami sebagai salah satu sarana penting dalam menyebarluaskan Islam versi Arab Saudi.

Pentingnya Akademi Fiqh Islam Internasional didirikan untuk mengembangkan suatu proses ijtihad secara kolektif yang berkaitan dengan isu-isu yang sedang dihadapi oleh umat Islam (Samuel, 2013, p. 107). Adanya proses ijtihad yang dilakukan oleh negara anggota OKI merupakan sarana dalam menentukan dasar hukum Islam selain menggunakan Al-Qur'an dan Hadits. Maka dari itu, dengan adanya dukungan dari negara anggota Organisasi Kerja sama Islam tentunya dapat memperkuat eksistensi dari kepemimpinan Arab Saudi terhadap pengetahuan Islam.

Selanjutnya kantor pusat dari Organisasi Kerja sama Islam berada di Arab Saudi yang berusaha untuk mengorganisir berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan

oleh organisasi tersebut. Lebih lanjut keistimewaan yang diperoleh Arab Saudi sebagai negara tuan rumah dapat digunakan untuk memobilisasi berbagai pertemuan dalam bentuk bilateral atau multilateral terhadap negara anggota. Kemudian sarana terpenting lainnya yang didapatkan oleh Arab Saudi adalah terpilihnya Yousef Ahmed Al-Othaimeen sebagai Sekretaris Jendral OKI yang berpusat di Arab Saudi tahun 2016 (Arab News, 2016).

Di satu sisi, dengan terpilihnya orang Arab Saudi sebagai Sekretaris Jendral OKI menandakan bahwa Arab Saudi lebih menitikberatkan optimalisasi kepentingan luar negerinya tercapai dengan baik khususnya terhadap negara anggota OKI. Di sisi lain, kondisi ini dipandang Arab Saudi sebagai peluang dalam meminimalisir pengaruh Iran di regional Timur Tengah. Hal tersebut tentunya dapat mencerminkan perilaku Arab Saudi yang pada akhirnya akan menciptakan suatu konfrontasi terhadap Iran dalam internal kelembagaan OKI yang juga akan mempengaruhi tatanan politik dan sosial negara anggota OKI.

Kemudian Arab Saudi semakin meningkatkan upayanya terhadap negara Organisasi Kerja sama Islam dalam rangka membangun aliansi militer. Hal ini dibuktikan dengan adanya pembentukan *Islamic Military Alliance to Fight Terrorism (IMAFIT)* tahun 2015 atas inisiasi dari Arab Saudi dan beranggotakan 34 negara anggota OKI (Global Security Organizations, 2018). Pembentukan lembaga tersebut tentunya bertujuan untuk mengorganisir operasi militer dalam rangka memberantas aksi terorisme di Timur Tengah.

Selain itu keberadaan dari adanya lembaga internasional yang memfasilitasi kerja sama dalam bidang militer telah mendapatkan dukungan dari negara Amerika Serikat. Adanya dukungan tersebut secara spesifik tertuang dalam pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Trump ketika melakukan kunjungan ke Arab Saudi tahun 2017 (White House, 2017). Adapun isi pernyataan tersebut yaitu :

- 1. The two leaders affirmed their determination to unite and integrate efforts between the United States-led Global Coalition Against ISIS with Saudi Arabia and the Saudi-led Islamic Military Alliance to Fight Terrorism.*
- 2. The two leaders also stressed that Iran's interference poses a threat to the security of the region and the world, and that the nuclear agreement with Iran needs to be re-examined in some of its clauses. The Iranian ballistic missile program poses a threat, not only to neighboring countries, but also a direct threat to the security of all countries in the region as well as global security.*

Berdasarkan pernyataan di atas bahwasannya legitimasi yang diberikan oleh pemerintah Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump dipahami sebagai usaha Arab Saudi untuk melawan pengaruh Iran di Timur Tengah. Selain itu Arab Saudi mencoba untuk membangun kekuatan bersama dengan negara anggota Organisasi Kerja sama Islam yang tergabung dalam *IMAFT* tersebut dalam meningkatkan hegemoninya di Organisasi Kerja sama Islam.

Lebih lanjut bahwa Arab Saudi mencoba untuk memberantas aksi terorisme di regional Timur Tengah yang diikuti dengan usaha untuk meminimalisir kekuatan militer Iran melalui program pengembangan nuklir. Akan tetapi upaya tersebut akan senantiasa semakin optimal jika mendapatkan suatu dukungan dari negara Amerika Serikat, sehingga pada akhirnya akan mampu menarik perhatian dari negara lainnya

untuk bergabung dengan badan militer tersebut. Di satu sisi, peluang Arab Saudi memberikan upayanya terhadap negara anggota OKI akan semakin optimal.

Di sisi lain, kondisi ini dapat berkontribusi dalam membawa negara anggota OKI ke dalam pola pemikiran Arab Saudi dalam mempromosikan definisi terorisme. Sehingga tidak mengherankan bahwa Arab Saudi mengklaim Iran sebagai negara yang mendukung aksi terorisme di Timur Tengah khususnya yang ditujukan kepada Hizbullah (Fabian, 2016). Maka dari itu munculnya *IMAFT* telah mampu memfasilitasi dalam meningkatkan eksistensi Arab Saudi untuk menarik banyak negara anggota OKI agar terlibat dalam organisasi keamanan tersebut. Lebih jauh lagi bahwa adanya *IMAFT* akan meningkatkan kepercayaan terhadap Arab Saudi.

Selanjutnya Arab Saudi terus memberikan perhatian terhadap negara anggota OKI yang tergabung dalam koalisi Arab Saudi untuk melawan aksi terorisme. Adapun perhatian yang dimaksud adalah dengan memberikan bantuan luar negeri dalam bentuk pendanaan khususnya kepada Pakistan sebesar US\$ 122 juta (Rana, 2016). Di satu sisi, upaya tersebut merupakan bentuk apresiasi terhadap Pakistan karena ingin terlibat langsung dalam keanggotaan *IMAFT*. Di sisi lain, pemberian bantuan dana dipandang sebagai usaha Arab Saudi untuk memperkuat keberadaan militer Pakistan khususnya di kawasan Teluk Arab.

Dengan demikian, berdasarkan informasi di atas bahwa Arab Saudi mencoba untuk mengubah suatu posisi kepemimpinan dalam Organisasi Kerja sama Islam menjadi suatu upaya hegemoni melalui pendekatan *soft power* dalam hal ketergantungan dana. Adapun perubahan posisi yang awalnya kepemimpinan menjadi

hegemoni dalam suatu rezim internasional tentunya dapat menyebabkan negara lain untuk membangun suatu ketergantungan, baik secara politik maupun ekonomi. Akan tetapi dengan adanya ketergantungan dari Organisasi Kerja sama Islam terhadap bantuan keuangan Arab Saudi dikhawatirkan dapat menimbulkan suatu efek terhadap netralitas OKI dalam dunia internasional terutama jika ditemukan konflik antar negara anggota OKI.

Sementara itu, posisi dan peran Arab Saudi yang dominan dalam internal kelembagaan Organisasi Kerja sama Islam membuat negara lainnya patuh terhadap Arab Saudi. Karena dengan kedudukan secara dominan yang dimiliki oleh Arab Saudi tentunya akan menciptakan suatu kekuatan untuk melawan negara lain yang dipandang oleh Arab Saudi sebagai ancaman dalam mempertahankan eksistensi di kawasan Timur Tengah maupun Organisasi Kerja sama Islam.

Terlepas dari hal tersebut bahwa kondisi di atas dikhawatirkan dapat digunakan oleh suatu negara sebagai sarana dalam mewujudkan kepentingan luar negerinya, bahkan dapat menurunkan kredibilitas Organisasi Kerja sama Islam di dunia Islam. Untuk itu hal ini harus senantiasa diantisipasi dengan sedemikian rupa oleh negara anggota OKI. Adapun dalam perkembangannya pemerintah Arab Saudi mencoba untuk membentuk suatu kekuatan dalam melawan kebangkitan Iran di Timur Tengah.

Lebih lanjut, pemerintah Arab Saudi berusaha untuk mencari strategi khusus dalam rangka membangun dukungan politik terhadap negara anggota OKI. Maka dari itu, perubahan posisi Arab Saudi yang semakin dominan dalam internal kelembagaan

OKI akan memudahkan Arab Saudi untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Dengan demikian, pemerintah Arab Saudi mengajak negara anggota OKI untuk menyelesaikan konflik antara Arab Saudi dengan Iran yang semakin memanas terutama pasca eksekusi mati Syekh Nimr Al-Nimr tahun 2016.

3.2 Organisasi Kerja sama Islam sebagai landasan politik Arab Saudi dalam meminimalisir pengaruh Iran di Timur Tengah

Adanya perseteruan yang meningkat antara Arab Saudi dengan Iran terutama keterlibatan secara tidak langsung dari kedua negara dalam konflik di Iraq, Yaman dan Suriah dengan tujuan untuk memperluas pengaruh di Timur Tengah. Selain itu, kondisi di atas yang diikuti dengan adanya eksekusi mati terhadap ulama Syi'ah dalam hal ini Syekh Nimr tentunya membuat hubungan Arab Saudi dan Iran semakin memburuk. Maka dari itu, hubungan konflik Iran dan Arab Saudi yang terus berkembang hingga saat ini membutuhkan usaha yang efektif dan efisien dalam mendamaikan perseteruan antara Iran dengan Arab Saudi.

Adapun pada bab sebelumnya sudah dijelaskan adanya usaha Arab Saudi untuk melakukan rekonsiliasi hubungan dengan Iran terutama pasca eksekusi mati Syekh Nimr Al-Nimr. Pendekatan yang diambil oleh pemerintah Arab Saudi dalam menyelesaikan konflik dengan Iran menggunakan cara yang bersifat damai. Kemudian, inisiasi yang dibuat oleh pemerintah Arab Saudi dengan tujuan untuk normalisasi hubungan antara Iran dengan Arab Saudi menunjukkan adanya iktikad baik yang pada akhirnya akan membentuk suatu perdamaian khususnya di regional Timur Tengah.

Usaha lainnya yang dilakukan pemerintah Arab Saudi untuk melakukan normalisasi hubungan dengan Iran dapat menggunakan pihak ketiga atau mediator. Adanya mediator dapat berfungsi sebagai pihak yang dapat memberikan solusi terkait konflik Arab Saudi dan Iran yang terjadi hingga saat ini. Adapun dalam upayanya untuk membangun hubungan damai dengan Iran, pemerintah Arab Saudi meminta kepada Irak melalui Perdana Menteri Haider Al-Abadi untuk menjadi mediator (O'Toole, 2017). Lebih lanjut upaya tersebut direspon secara positif oleh pemerintah Iran atas dasar solidaritas Islam dan untuk mengurangi ketegangan di Timur Tengah.

Inisiatif lainnya yang disusun oleh pemerintah Arab Saudi dalam rangka menyelesaikan konflik dengan Iran melalui mekanisme organisasi internasional. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya pertemuan negara anggota OKI di Jeddah untuk membahas perkembangan konflik Suriah dan penyerangan demonstrasi Iran terhadap kantor kedutaan Arab Saudi di Teheran (Fauzi G. A., 2017, pp. 1201-1204). Adanya pertemuan negara anggota OKI tersebut diusulkan oleh pemerintah Arab Saudi untuk menyelesaikan konflik di Timur Tengah khususnya dengan Iran pasca eksekusi mati Syekh Nimr Al-Nimr. Maka dari itu, pemerintah Arab Saudi telah menentukan langkah yang positif untuk membangun hubungan damai dengan Iran.

Dalam perkembangannya, peneliti beranggapan bahwa upaya yang akan diambil oleh Arab Saudi dalam menyelesaikan konfliknya dengan Iran dapat melalui eksistensi dari Organisasi Kerja sama Islam. Lebih lanjut, peneliti akan memberikan suatu interpretasi mengenai pendekatan yang akan diambil oleh Arab Saudi melalui penggunaan teori aktor rasional. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa

adanya teori aktor rasional berusaha untuk mengamati fenomena dalam hubungan internasional terutama yang berkaitan dengan pengambilan keputusan oleh negara.

Kemudian dalam menentukan keputusan yang akan diambil oleh suatu negara tentunya membutuhkan berbagai preferensi dan alternatif dalam memperoleh kepentingan yang sangat menguntungkan. Adapun dalam mengetahui perilaku negara yang akan dijalankan oleh negara tersebut harus senantiasa memperoleh informasi sebanyak-banyaknya karena akan berpengaruh dalam mencapai keuntungan yang maksimal (Hausken, 2016, pp. 454-459).

Melihat dari adanya upaya Arab Saudi dalam internal kelembagaan Organisasi Kerja sama Islam terutama dalam hal pendanaan dan dominasinya terhadap susunan struktur OKI dapat dipandang sebagai alat untuk mencapai kepentingannya. Lebih lanjut, keberadaan rezim internasional dalam hal ini Organisasi Kerja sama Islam yang merupakan organisasi terbesar kedua setelah PBB dapat menjadi batu loncatan bagi Arab Saudi dalam meningkatkan kredibilitasnya di Timur Tengah, bahkan dapat membentuk kekuatan dalam melawan musuh Arab Saudi.

Pada intinya, upaya Arab Saudi akan memunculkan suatu pandangan yang menjelaskan kepentingan Arab Saudi di dalam OKI. Untuk itu, berbicara mengenai kepentingan Arab Saudi diantaranya adalah memperbaiki harga minyak bumi yang semakin melemah hingga mencapai, melawan kebangkitan Iran yang ingin menyebarkan gagasan revolusioner Islam terhadap negara sekutu Arab Saudi, mempertahankan eksistensi rezim monarki di Timur Tengah. Adapun dalam

mencapai berbagai kepentingan tersebut membutuhkan usaha yang keras dan berkelanjutan agar memperoleh hasil yang optimal.

Selanjutnya, preferensi yang senantiasa akan diambil oleh Arab Saudi dalam menyelesaikan konflik dengan Iran diantaranya dapat menggunakan pendekatan militer (*hard power*) atau menggunakan pendekatan damai (*soft power*). Jika dalam perkembangannya Arab Saudi memilih dengan pendekatan militer dalam hal ini melalui *proxy war* di Iraq, Yaman dan Suriah tentunya akan semakin melemahkan harga minyak bumi yang mencapai US\$ 30 per barel (Ngai, 2016).

Adapun ketergantungan Arab Saudi dari pendapatan minyak bumi sebesar 88% (Reimann, 2016). Selain itu, kerugian yang akan diterima oleh Arab Saudi adalah stabilitas politik, ekonomi dan keamanan Timur Tengah semakin terganggu. Selain itu, bahwasannya Arab Saudi menjadi negara pengimpor senjata sebesar 27% dari Amerika Serikat (Shahab, 2017, p. 8). Lebih lanjut kondisi tersebut telah membuat Arab Saudi menjadi pasar terbesar kedua dalam hal perdagangan senjata dunia dan mengalami peningkatan sebesar 275% terhadap impor senapan tahun 2006-2010 (Fleurant, 2016, p. 8). Untuk itu, Arab Saudi harus senantiasa mempertimbangkan kerugian dan keuntungan yang diperoleh negara tersebut jika menggunakan kekuatan militer.

Selanjutnya, alternatif lainnya jika Arab Saudi memilih untuk menggunakan pendekatan damai terutama dalam keanggotaannya di Organisasi Kerja sama Islam, maka akan diperoleh secara mayoritas negara Islam di seluruh dunia menganut paham Sunni sebesar 87-90% (Jawan, 2013, pp. 1-12). Hal tersebut juga termasuk di

dalamnya adalah negara anggota OKI. Selain itu, secara mayoritas negara anggota OKI sebanyak 70% terlibat dalam organisasi keamanan *IMAFT* (Ahmad, 2017, p. 9). Dengan demikian kondisi tersebut juga dapat didukung dengan adanya ketergantungan terhadap pendanaan Arab Saudi, dominasi susunan struktur dalam Organisasi Kerja sama Islam.

Maka dari itu, sebagai aktor rasional, Arab Saudi akan cenderung memilih pendekatan damai untuk menyelesaikan konflik dengan Iran karena lebih banyak menghasilkan keuntungan dibandingkan kerugian berdasarkan data yang diperoleh di atas. Kemudian pendekatan damai yang akan diambil oleh Arab Saudi dinilai akan meminimalisir berbagai korban jiwa dan kerusakan berbagai bangunan yang diakibatkan adanya konflik di Suriah, Yaman dan Iraq yang juga diikuti oleh Arab Saudi dan Iran, bahkan dapat mengurangi tingkat eskalasi konflik yang terjadi di regional Timur Tengah.

Adapun peneliti juga beranggapan bahwa jika Arab Saudi lebih memilih untuk menggunakan kekuatan militer dalam menghadapi Iran tentunya akan semakin banyak biaya yang dikeluarkan. Lebih lanjut, pemerintah Arab Saudi setiap tahunnya meningkatkan anggaran militer. Hal ini dibuktikan bahwa anggaran militer Arab Saudi dalam kurun waktu 2016 sebesar US\$ 47 miliar yang selanjutnya pada tahun 2017 dinaikkan menjadi US\$ 50 miliar, selain itu pada tahun 2018 anggaran lebih ditingkatkan menjadi US\$ 58 miliar (Bharwana, 2017).

Kemudian hingga saat ini Arab Saudi juga telah menjadi negara pembeli terbesar senjata khususnya di kawasan Timur Tengah yang telah menghabiskan biaya

lebih dari US\$ 80 miliar dan mengalami peningkatan sebesar 300% (DePetris, 2017). Upaya pemerintah Arab Saudi dalam meningkatkan kekuatan militer tentunya didorong oleh adanya cadangan devisa yang besar, pendapatan dari penjualan minyak mentah dan keinginan Arab Saudi untuk mengatasi pengaruh Iran di Timur Tengah.

Namun adanya pengeluaran tersebut justru dikhawatirkan tidak sebanding dengan keuntungan yang diperoleh dan apabila Arab Saudi memutuskan untuk perang dengan Iran, maka pengeluaran untuk militer akan semakin besar dan cenderung merugikan Arab Saudi. Maka dari itu usaha tersebut hanya akan memperkuat pertahanan Arab Saudi di Timur Tengah jika memang sewaktu-waktu Iran melakukan agresi militer untuk menghalangi Arab Saudi. Artinya adanya anggaran yang semakin banyak dikeluarkan Arab Saudi dalam rangka meningkatkan kekuatan militer cenderung akan senantiasa menjadi kebutuhan yang mendesak untuk mengatasi kondisi Timur Tengah saat ini.

Untuk itu, pemerintah Arab Saudi mencoba untuk mempertimbangkan dalam mengambil keputusan untuk terus mempertahankan posisinya sebagai negara yang berpengaruh dalam konstelasi politik di Timur Tengah. Lebih lanjut, tindakan yang dapat mengarahkan pada upaya Arab Saudi untuk menjadi negara adidaya tentunya harus mampu menjadikan posisinya menjadi negara hegemon terutama dalam hal ekonomi, militer, politik dan keamanan. Dengan adanya pergeseran posisi Arab Saudi yang menjadi hegemoni tentunya dapat menarik perhatian publik khususnya di kawasan Timur Tengah.

Selanjutnya, Arab Saudi juga telah berhasil menggunakan forum Organisasi Kerja sama Islam dalam mencapai kepentingannya yaitu membangun suatu front untuk menghentikan kebangkitan Islam Iran di regional Timur Tengah. Untuk itu, perlu kita ketahui bahwa pembentukan Organisasi Kerja sama Islam pada dasarnya sebagai organisasi internasional yang menaungi kepentingan umat Islam di seluruh dunia. Lebih lanjut bahwa kapasitas Organisasi Kerja sama Islam sebagai agen resolusi konflik yang juga telah menjadi mitra PBB dalam menyelesaikan konflik khususnya yang melanda umat Islam (UN News Center , 2016).

Artinya Organisasi Kerja sama Islam telah mendapatkan suatu kepercayaan dari PBB untuk saling berkoordinasi dalam menentukan langkah untuk mendamaikan negara yang sedang berkonflik. Di satu sisi, pendirian Organisasi Kerja sama Islam berusaha untuk mengakomodir kepentingan umat Islam terutama dalam hal penyelesaian konflik. Di sisi lain, Organisasi Kerja sama Islam juga akan senantiasa menunjukkan komitmennya untuk menyelesaikan konflik terhadap umat Islam itu sendiri. Adapun komitmen dari Organisasi Kerja sama Islam dalam menyelesaikan konflik di dunia Islam khususnya terhadap negara anggotanya telah tertuang dalam piagamnya yaitu (OIC, 2018)

*CHAPTER XV
Peaceful Settlement of Disputes*

Article 27

The Member States, parties to any dispute, the continuance of which may be detrimental to the interests of the Islamic Ummah or may endanger the maintenance of international peace and security, shall, seek a solution by good offices, negotiation, enquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement or other peaceful means of their own choice. In this context good offices may include consultation with the Executive Committee and the Secretary-General.

Article 28

The Organisation may cooperate with other international and regional organisations with the objective of preserving international peace and security, and settling disputes through peaceful means.

Uraian terkait isi dari piagam OKI di atas menunjukkan bahwa organisasi Islam tersebut akan senantiasa berkomitmen dan bertanggung jawab terhadap adanya perselisihan yang terjadi terhadap negara anggotanya. Adapun dalam penyelesaiannya melalui cara yang bersifat persuasif dan pendekatan damai. Untuk itu penggunaan cara damai yang dilakukan oleh OKI mengacu pada mekanisme ajaran Islam dalam mengatasi konflik.

Namun dalam perkembangannya, Organisasi Kerja sama Islam terus menghadapi berbagai tantangan yang cukup sulit untuk diselesaikan dalam hal ini yang berkaitan dengan ketegangan antara Arab Saudi dengan Iran yang terus terjadi hingga saat ini. Adapun dinamika yang dimaksud adalah bahwa Arab Saudi dan Iran yang merupakan negara anggota Organisasi Kerja sama Islam telah mampu memanfaatkan suatu forum yang diselenggarakan organisasi internasional tersebut

sebagai sarana dalam menyebarluaskan pengaruh sektarian dari masing-masing negara terhadap dunia Islam (Johnson, 2010).

Artinya, baik Arab Saudi maupun Iran dapat memanfaatkan keberadaan rezim internasional tersebut untuk memfasilitasi kedua negara dalam mencapai hubungan damai. Lebih lanjut, Arab Saudi memandang Organisasi Kerja sama Islam sebagai sarana dalam mendapatkan pengaruhnya secara geopolitik dan senantiasa menegaskan kepemimpinan Arab Saudi dalam menentukan tujuan bersama terhadap organisasi tersebut (Destradi, 2008, pp. 5-7). Hal di atas telah menunjukkan bahwa pembentukan Organisasi Kerja sama Islam dapat menjadikan Arab Saudi memiliki suara terdepan di dunia Islam itu sendiri.

Di satu sisi, hal di atas juga dapat berkontribusi dalam menciptakan suatu kondisi yang rumit karena adanya konflik di Suriah, Yaman dan Iraq yang diikuti oleh Iran dan Arab Saudi. Di sisi lain, Organisasi Kerja sama Islam tidak dapat secara langsung mengintervensi dalam penyelesaian konflik tersebut karena adanya persaingan Arab Saudi dan Iran terutama yang terjadi di internal kelembagaan OKI. Artinya, Organisasi Kerja sama Islam harus senantiasa memberikan pendapatnya mengenai konflik sektarian antara Iran dengan Arab Saudi.

Untuk itu, Arab Saudi membangun kekuatan dengan mengajak negara anggota Organisasi Kerja sama Islam dalam usahanya untuk menghentikan kebangkitan Iran dan sekutunya di Timur Tengah. Kemudian Organisasi Kerja sama Islam senantiasa dimanfaatkan oleh Arab Saudi untuk membentuk pandangan yang mengarah pada dukungan Arab Saudi dalam meminimalisir kebangkitan Iran itu

sendiri. Maka dari itu, keberhasilan Arab Saudi dalam mengatasi Iran dan sekutunya di Timur Tengah dapat dilihat pada Konferensi Tingkat Tinggi ke-13 yang diselenggarakan di Turki tahun 2016 yang menghasilkan resolusi diantaranya (United State Institute of Peace, 2016).

33. The Conference deplored Iran's interference in the internal affairs of the States of the region and other Member States including Bahrain, Yemen, Syria, and Somalia, and its continued support for terrorism.

105. The Conference condemned Hizbollah for conducting terrorist activities in Syria, Bahrain, Kuwait and Yemen and for supporting terrorist movements and groups undermining the security and stability of OIC Member States.

Adapun resolusi yang dihasilkan oleh Organisasi Kerja sama Islam ditujukan kepada negara anggotanya yaitu Iran. Selain itu, isi dari resolusi tersebut menunjukkan bahwa Iran merupakan negara yang mendukung aksi terorisme Hizbullah. Lebih lanjut bahwa negara anggota Organisasi Kerja sama Islam mengharapkan Iran tidak melakukan intervensi terhadap urusan dari negara anggota lainnya yang senantiasa akan memperumit tingkat eskalasi konflik di Suriah, Iraq dan Yaman.

Di satu sisi, adanya KTT OKI ke-13 yang diselenggarakan di Turki merupakan bentuk tindak lanjut dari adanya penyerangan yang dilakukan oleh warga Syi'ah terhadap kedutaan Arab Saudi di Teheran. Di sisi lain, Arab Saudi telah mampu menunjukkan kiprahnya dalam keanggotaan Organisasi Kerja sama Islam yang juga telah mengubah posisinya menjadi negara yang paling berpengaruh terhadap organisasi tersebut. Untuk itu, Arab Saudi mencoba untuk menjadi negara

adidaya dengan cara mempengaruhi negara anggota Organisasi Kerja sama Islam agar mengikuti keinginan dari Arab Saudi.

Walaupun demikian, adanya pertemuan negara anggota OKI dalam KTT OKI ke-13 tahun 2016 yang berlangsung di Turki juga menjadi peluang potensial bagi Arab Saudi. Adapun peluang tersebut yaitu Arab Saudi berusaha untuk menggulingkan kepemimpinan Presiden Bashar Al-Assad di Suriah yang dinilai oleh Arab Saudi sebagai sekutu Iran dan ancaman dalam menghalangi kepemimpinan Arab Saudi (Ezzat, 2016). Lebih lanjut, Arab Saudi senantiasa memanfaatkan momentum dalam pertemuan tersebut sebagai alat untuk meningkatkan dukungan terhadap Arab Saudi dalam mencapai kepentingan nasionalnya.

Oleh karena itu, peneliti memandang bahwasannya adanya suatu perbedaan paham keagamaan Sunni dan Syi'ah khususnya terhadap negara anggota Organisasi Kerja sama Islam tidak dapat menjadi sumber persatuan. Kondisi tersebut juga telah berkontribusi dalam menciptakan sumber ketegangan antar negara anggota OKI karena perbedaan sektarian. Lebih lanjut, baik Arab Saudi maupun Iran yang memiliki kekayaan dalam hal minyak mentah dan kemampuan secara finansial tentunya dapat memunculkan strategi yang cukup agresif dalam mencapai kepentingannya, sehingga akan sulit untuk memisahkan tujuan politik, diplomatik dan keagamaan (Haynes, 2001, pp. 143-158).

Dengan demikian, sebagai aktor rasional, Arab Saudi senantiasa menggunakan pendekatan damai melalui eksistensi Organisasi Kerja sama Islam dalam usahanya untuk membangun hubungan damai dengan Iran terutama pasca

eksekusi mati Syekh Nimr Al-Nimr. Adapun melalui pendekatan damai dan pengaruh yang dominan yaitu sebagai negara pendonor terbesar dan dominan dalam struktur kelembagaan Organisasi Kerja sama Islam dapat membawa Arab Saudi memperoleh keuntungan yang maksimal dalam rangka normalisasi hubungan dengan Iran dibandingkan dengan penggunaan kekuatan militer.